

**PANCASILA SEBAGAI INSTITUSI PENGGERAK
TRANSFORMASI STRUKTUR SOSIAL BANGSA:
SEBUAH KAJIAN EKONOMI POLITIK**

Bhimo Rizky Samudro

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret Surakarta
Email: bhimosamudro@staff.uns.ac.id / bhimosamudro@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini melakukan evaluasi dan kajian tentang peran Pancasila sebagai institusi ideologi dalam transformasi struktur sosial bangsa. Kajian ini melihat beberapa komponen utama dalam Pancasila yang berpotensi sebagai pemacu transformasi dan metamorfosa struktur bangsa dalam beberapa fase sejarah dari kemerdekaan sampai era pasca reformasi ini. Perspektif ekonomi politik berguna sebagai metode evaluasi dalam proses transformasi tersebut. Studi ini mengaplikasikan pendekatan ekonomi politik dalam tiga bagian analisis. Analisis pertama mencoba melakukan identifikasi komponen utama dalam Pancasila beserta pola dasarnya selama fase sejarah bangsa. Di dalam analisis kedua, keterkaitan dan sirkulasi antar komponen utama tersebut akan dihubungkan dengan beberapa fenomena sosio-ekonomi dalam proses sejarah bangsa. Keterkaitan antara komponen utama dan fenomena sosio-ekonomi akan dievaluasi dengan proses amplifikasi atau dampak kausalitasnya bagi masyarakat selama masa kemerdekaan sampai era reformasi ini. Hasil analisis ketiga ini dapat digunakan sebagai pola dasar (*pattern*) dalam melihat posisi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan proses transformasinya sebagai institusi yang memberikan pengaruh pada struktur sosial bangsa.

Kata kunci: Pancasila, ekonomi politik, institusi, struktur sosial, transformasi

ABSTRACT

This study evaluates and studies the role of Pancasila as an ideological institution in the transformation of the nation's social structure. This study looks at several main components in Pancasila that have the potential to spur transformation and metamorphosis of the nation's structure in several historical phases from independence to the post-reform era. The political economy perspective is useful as an evaluation method in the transformation process. This study applies a political economy approach in three parts of the analysis. The first analysis tried to identify the main components in Pancasila and their basic patterns during the history phase of the nation. In the second analysis, the linkages and circulation between the main components will be related to several socio-economic phenomena in the process of the nation's history. The linkages between the main components and socio-economic phenomena will be evaluated by the process of amplification or the impact of causality on the people during the independence period until the reform era. The results of this third analysis can be used as a pattern in seeing the position of Pancasila as the ideology of the nation and its transformation process as an institution that influences the social structure of the nation.

Keywords: Pancasila, political economy, institution, social structure, transformation

PENDAHULUAN

Kajian dalam studi ini mengevaluasi tentang posisi Pancasila sebagai institusi bangsa yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola transformasi sosial di masyarakat. Sebagai institusi, Pancasila dapat menjadi ideologi yang mengatur tata kelola warga negara. Posisi Pancasila dapat bersimbiosis dengan agama untuk menjadi pedoman pola hidup dan pikir bangsa dalam berkehidupan secara individu maupun masyarakat. Nilai luhur dari institusi Pancasila sebenarnya cukup selaras dengan nilai-nilai suci yang ada dalam setiap agama. Dalam konteks ini, penerapan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bagaimana setiap warga negara yang notabene juga umat beragama, menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing.

Di sisi lain, institusi Pancasila juga berpotensi dipengaruhi oleh beberapa perkembangan institusi eksogen yang ada di masyarakat sepanjang berjalannya waktu. Perubahan dalam penghayatan dapat diakibatkan beberapa faktor eksogen yang berkembang dalam periode sejarah bangsa Indonesia. Perkembangan institusi teknologi secara sistematis dapat mempengaruhi pola hidup dan pikir di dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Sebagai contoh, institusi teknologi juga membawa dampak negatif, disamping manfaatnya bagi peningkatan kinerja di masyarakat. Teknologi menghadirkan beragam perkembangan model barang dengan harga bervariasi yang dapat memicu pola hidup hedonis dan bahkan terkadang mempengaruhi ideologi untuk menimbulkan sikap apatis terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Orang akan lebih tertarik mengalokasikan sisa dana dan asset pribadi hanya untuk mengejar barang teknologi tersier dan mewah daripada melakukan sedekah dan sumbangan bagi masyarakat dhuafa dan proletar. Hal ini secara tidak langsung akan mereduksi penerapan dan penghayatan terhadap nilai-nilai institusi Pancasila dan agama yang dengan jelas menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan.

Pola keterkaitan perubahan institusi dan transformasi sosial dijelaskan dalam perspektif ekonomi politik melalui konsep Akumulasi Struktur Sosial (Gordon, Weisskopf and Bowles 1983, Kotz 2008, O'Hara 2008). Konsep ini melihat bahwa ketika suatu institusi yang membawa tata nilai atau ideology tertentu mengalami perubahan, maka proses transformasi struktur sosio-ekonomi akan terjadi seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini, Pancasila selain berpotensi memacu transformasi struktur tata nilai sosio-ekonomi,

namun perkembangannya juga dipengaruhi oleh transformasi dan proses kedewasaan dari struktur sosial di masyarakat.

Perubahan karakteristik institusi Pancasila maupun transformasi dalam struktur sosio-ekonomi masyarakat dapat dilihat dari berbagai macam indikator dan sudut pandang. Berdasarkan sudut pandang dampak akumulasi struktur sosial, Myrdal (1944, 1968) menjelaskan tentang pola keterkaitan antara aspek sosio-ekonomi dan kultural dalam suatu institusi dapat memacu adanya proses kausa kumulatif yang menghasilkan dampak bagi sistem dimana struktur sosial tersebut berada. Kaldor (1972) mengadopsi konsep Myrdal dan mengemukakan tentang dinamisasi proses kausa kumulatif melalui periode waktu tertentu dapat distimulasi melalui perubahan institusi.

Di samping proses kausa kumulatif, salah satu indikator lain untuk dalam keterkaitan antara institusi dan struktur sosial adalah adanya proses kontradiksi. Proses kontradiksi terjadi apabila institusi ternyata memacu peningkatan tata nilai atau aspek dalam struktur sosial namun mengakibatkan dampak penurunan pada tata nilai atau aspek lain di saat yang bersamaan seiring berjalannya waktu (Zedong 1937; Polanyi 1944; O'Hara 2008, Berger 2008a, 2008b). Dalam konsep ini, perubahan Pancasila sebagai institusi dapat memacu proses kontradiksi dalam struktur sosial bangsa apabila faktor endogen tidak dapat berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, proses simbiosis antara Pancasila dan agama dalam berperan positif sebagai faktor endogen yang dapat mereduksi adanya kontradiksi. Namun jika dalam suatu waktu, institusi Pancasila dan agama ternyata mengalami perbedaan tata nilai, maka transformasi sosial di masyarakat dapat mengalami kontradiksi.

Berdasarkan perspektif dan konsep ekonomi politik di atas, maka kajian ini memunculkan sebuah pertanyaan: bagaimana keterkaitan Pancasila sebagai institusi terhadap transformasi struktur sosio-ekonomi bangsa Indonesia? Kajian ekonomi politik ini akan mencoba untuk menampilkan pola (*pattern*) dalam proses keterkaitan tersebut dalam proses sejarah Indonesia. Dalam konteks ini, beberapa prinsip ekonomi politik akan membantu menyusun simplifikasi metode dalam menganalisis pokok permasalahan di atas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian tentang keterkaitan institusi Pancasila dan transformasi struktur sosial di Indonesia ini menggunakan metode ekonomi politik heterodoks. Ekonomi politik heterodoks menekankan pada kombinasi konseptual antara prinsip dasar teori, analisis teknis non-deterministik dan variasi proxy dari data. Kombinasi dari ketiga aspek tersebut merupakan metode untuk melakukan kajian dalam studi ini.

Prinsip dasar teori ekonomi politik yang digunakan dalam kajian ini mencakup pada empat prinsip utama. Prinsip pertama adalah prinsip gelombang panjang yang menekankan pada pentingnya peran faktor sejarah. Faktor sejarah merupakan komponen atau alat yang berfungsi untuk menganalisa karakter atau pola umum dari sesuatu dalam suatu institusi tertentu seiring berjalannya waktu. Karakteristik dari sesuatu akan dilihat berdasarkan aspek ukuran (besar atau kecil) dan juga dilihat berdasarkan aspek amplitudo (gerakan meningkat atau menurun) dalam pengamatan jangka panjang. Sebagai contoh, pendapatan per kapita warga negara mengalami peningkatan sebesar 2.5 persen dari dekade 1950-an ke dekade 1980-an. Unsur ‘peningkatan’ merupakan bagian dari aspek amplitudo dan aspek ukuran ditunjukkan dengan angka 2.5 persen. Pola indikator ini akan dikaitkan dengan keberadaan institusi sebagai penggerak transformasi struktur sosial.

Prinsip kedua adalah prinsip kausa kumulatif yang menganalisa tentang pola keterkaitan antar faktor dalam struktur sosial di bawah institusi tertentu, yang dapat memacu dampak kumulatif terhadap pola struktur tersebut seiring berjalannya waktu. Dalam konteks ini, prinsip ini melihat peran institusi untuk menjaga keterkaitan antar faktor dalam struktur sosial agar menciptakan dampak kumulatif yang positif dan berkesinambungan pada jangka panjang. Sebagai contoh, Pancasila sebagai suatu institusi bangsa dapat mengelola keterkaitan antara kenaikan faktor ekonomi yang mengakibatkan peningkatan standar kesehatan dan pendidikan. Dengan peningkatan standar kualitas hidup warga negara maka aspek-aspek lain juga akan mengalami peningkatan.

Prinsip ketiga adalah prinsip kontradiksi dalam struktur sosial. Prinsip ketiga ini lebih menekankan pada pola pergerakan faktor-faktor struktur sosial yang berpotensi mengalami anomali satu dengan yang lain di bawah sebuah institusi tertentu. Kondisi kontradiksi antar faktor-faktor dalam struktur sosial dapat terjadi apabila institusi tidak dapat menjaga kesinambungan dan keselarasan dalam keterkaitan antar faktor. Dampak kumulatif yang bersifat positif bagi sistem kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berubah menjadi situasi kontradiktif.

Ketiga prinsip di atas akan dikaitkan dalam mendukung analisis non-deterministik dalam kajian ini. Analisa non-deterministik merupakan analisa yang tidak dengan baku dan rigid dalam menggunakan data-data kuantitatif sebagai faktor *determinant* suatu pola, kejadian atau masalah tertentu (Lawson 1989). Analisa ini akan melihat karakter atau pola suatu data dalam jangka panjang sehingga dapat dilihat siklus umum dan siklus khususnya. Pada siklus khusus, analisa ini akan menekankan untuk pencarian data-data untuk menjelaskan kenapa siklus khusus itu dapat terjadi di luar pola siklus umum.

Analisa non-deterministik juga menekankan pada aspek holistik yang menganalisa suatu peristiwa atau permasalahan dari berbagai sisi dan sudut pandang. Veblen (1989) menjelaskan bahwa keterkaitan antar faktor-faktor dalam sistem harus dilihat sebagai suatu sistem yang utuh dan dinamis. Boulding (1984) melihat keterkaitan antar faktor dalam sistem dunia merupakan suatu sistem total yang tidak dapat dianalisa secara parsial jika akan mengetahui pola dan karakteristiknya. Dalam konteks ini, analisa non-deterministik akan lebih melihat akar permasalahan institusi dan struktur sosial dari beberapa aspek dalam sistem dunia.

Di dalam mendukung analisa non-deterministik tersebut, diperlukan beragam data yang dapat menjadi proxy dari bermacam aspek atau faktor yang ada dalam sistem dunia. Beragam proxy data yang dikumpulkan dalam analisa ini bersifat menyesuaikan dengan pola dan karakter permasalahan yang ada. Dalam proses pengumpulan dan verifikasi data, beragam proxy data akan memunculkan beberapa batasan atau limitasi dalam kajian ini. Permasalahan heterogenitas data akan menyebabkan data terkadang tidak dapat dikomparasi secara kaidah statistik. Namun dengan penekanan pada non-deterministik, komparasi data akan berpedoman pada prinsip dalam ekonomi politik heterodoks untuk menjelaskan permasalahan dan akan mengurangi ketergantungan dengan kaidah statistik. Di samping itu, proxy data juga terkadang memiliki runtun waktu yang berbeda-beda karena berasal dari aspek yang beragam. Dalam hal ini, proxy data pun terkadang memiliki kekuatan yang lemah dalam mengukur proses dari suatu aspek tertentu. Hal ini menjadi bagian dari limitasi kajian ini tanpa mengurangi proses metodologis dalam mengurai permasalahan.

Analisis tentang keterkaitan Pancasila sebagai institusi penggerak transformasi struktur sosial bangsa dapat dibagi menjadi tiga bagian. Bagian pertama adalah menganalisis pergerakan komponen utama Pancasila dalam proses sejarah bangsa. Dalam analisis pertama ini, perubahan pola komponen utama dalam Pancasila akan dikaitkan

dengan transformasi sosio-ekonomi dan politik yang dialami oleh bangsa Indonesia dari fase kemerdekaan sampai dengan era pasca reformasi ini. Bagian kedua adalah melihat dan menganalisis tentang pola keterkaitan antar faktor dalam struktur sosial bangsa dan negara Indonesia di bawah institusi Pancasila, yang dapat menghasilkan dampak kausa kumulatif dan juga pola kontradiksi. Kedua pola tersebut dianalisa dengan menggunakan trend jangka panjang faktor ekonomi, sosial dan politik. Pada bagian analisis ketiga, kajian ini akan menyajikan integrasi analisis berdasarkan hasil analisis pada bagian pertama dan kedua. Analisis ketiga ini dapat memberikan deskripsi teoretis ekonomi politik tentang Pancasila sebagai institusi ideologi yang mempengaruhi proses transformasi struktur sosial bangsa.

Analisis bagian pertama akan ditunjukkan dengan ilustrasi Tabel 1. Tabel 1 menampilkan enam aspek utama yang dapat menunjukkan pola peran komponen utama Pancasila. Pertama, proses transformasi dari orde lama sampai order pasca reformasi dari dekade 1950s – 2000s. Baris kedua dan ketiga memberikan deskripsi tentang pola komponen dari institusi Pancasila. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita menjadi indikator proxy dari transformasi aspek ekonomi. Aspek sosial dijelaskan dengan indikator tingkat harapan hidup dalam jangka panjang di baris keempat. Sementara baris kelima dan keenam menjelaskan dua sisi aspek politik, yaitu tingkat pergerakan dan perubahan politik, serta yang kedua adalah tingkat hak politik dan kebebasan berserikat warga negara.

Tabel 1 Institusi Pancasila dan Transformasi Struktur Sosio-Ekonomi-Politik Indonesia, Dekade 1950s – Dekade 2000s

	1950s	1960s	1970s	1980s	1990s	2000s
Orde	Lama	Lama – Baru	Baru	Baru	Baru – Reformasi	Reformasi – Pasca Reformasi
Institusi	Pancasila-institusi natural dan formal sebagai basis kultural ideologis	Pancasila-institusi natural dan formal sebagai basis kultural ideologis	Pancasila-institusi formal sebagai alat determinasi politis – pola penetrasi tinggi ke masyarakat	Pancasila-institusi formal sebagai alat determinasi politis – pola penetrasi tinggi ke masyarakat	Pancasila-institusi formal sebagai alat determinasi politis – pola penetrasi moderat ke masyarakat	Pancasila-institusi formal sebagai alat determinasi politis – pola penetrasi moderat ke masyarakat
Aspek ekonomi (Pertumbuhan Produk Domestik Bruto per	1.00	1.90	5.39	4.07	5.35	3.38

kapita-persen)						
Aspek sosial (tingkat harapan hidup-tahun)	40.23	45.45	51.37	58.53	64.74	69.81
Aspek politik (peristiwa pergerakan politik)	Intensitas pergolakan politik tinggi	Intensitas pergolakan politik tinggi; pergantian kepala negara	Relatif stabil	Relatif stabil	Intensitas pergolakan politik meningkat; pergantian kepala negara (2 kali)	Intensitas pergolakan politik moderat; pergantian kepala negara (2 kali)
Aspek politik (tingkat kebebasan politik dan warga negara)	-	-	<i>Partly Free</i>	<i>Partly Free</i>	<i>Not Free</i>	<i>Partly Free</i>

Sumber: Data diolah dari World Bank (2010), UNDP (2010), Freedom House (2010), Wie (2002), Jeroen (2008)

Berdasarkan Gambar 1, terdapat beberapa pola dasar karakter institusi Pancasila yang dapat dilihat dalam jangka panjang perjalanan bangsa Indonesia. *Pola dasar pertama* adalah Pancasila mengalami tiga fase perubahan dalam posisinya sebagai institusi. Di era Orde Lama, institusi formal Pancasila sebagai ideologi negara memiliki pola natural dan formal sebagai basis ideologi warga negara dan pemerintahan. Pertumbuhan PDB per kapita Indonesia berada dalam posisi *downswing* di bawah 2 persen, sementara tingkat harapan hidup masih dibawah 50 tahun. Kondisi cukup memicu peningkatan pergerakan politis dengan begitu banyak percobaan pemberontakan dan pergantian kabinet di pemerintahan. Namun Pancasila sebagai institusi yang bersifat evolutif dan ‘tanpa paksaan’ diterima oleh warga negara. Dalam konteks ini, peran kepala negara di masa orde lama cukup mampu mengarahkan warga negara secara natural untuk menerima institusi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Antara dekade 1970s-2000s, Pancasila sebagai institusi yang bersifat kultural dan ideologis bertransformasi menjadi institusi formal yang memberikan determinasi politis bagi pemerintahan. Di era orde baru antara dekade 1970s sampai dengan akhir dekade 1990s, penetrasi institusi Pancasila sebagai alat politik antara hubungan pemerintah dan masyarakat berlangsung dalam instensitas tinggi. Struktur sosio-ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan dalam era orde lama, dimana pertumbuhan PDB per kapita mencapai lebih dari 5 persen dan tingkat harapan hidup mencapai antara 58 sampai 64 tahun. Peningkatan aspek sosio-ekonomi cukup mampu menstimulasi stabilisasi politik,

walaupun kebebasan berekspresi dan hak politik warga negara masih belum terbuka secara utuh.

Sementara pada era reformasi dan era pasca reformasi antara akhir dekade 1990s sampai dekade 2000s, pola institusi Pancasila sebagai alat determinasi masih berlangsung namun dalam instensitas yang moderat dibandingkan orde baru. Pada era reformasi dan pasca-reformasi, struktur sosio-ekonomi mengalami pola yang sedikit berubah. PDP per kapita mengalami sedikit penurunan dari posisi 4-5 persen di orde baru menjadi 3 persen di era pasca reformasi, sementara walaupun tingkat harapan hidup terus meningkat, nilai tambah angka harpan hidup sedikit menurun dibandingkan saat orde baru. Tingkat pergerakan politik mengalami peningkatan secara implisit disebabkan pada kejenuhan akibat penetrasi tinggi Pancasila sebagai alat determinasi politik. Bahkan kebebasan berekspresi dan hak politik warga negara sempat berada pada posisi ‘not free’ di akhir orde baru.

Tabel 2 Proses Kausa Kumulatif dan Kontradiksi Transformasi Struktur Sosio-Ekonomi-Politik Indonesia, Dekade 1950s – Dekade 2000s

	1950s	1960s	1970s	1980s	1990s	2000s
Orde	Lama	Lama – Baru	Baru	Baru	Baru – Reformasi	Reformasi – Pasca Reformasi
Institusi	Pancasila-institusi natural dan formal sebagai basis kultural ideologis	Pancasila-institusi natural dan formal sebagai basis kultural ideologis	Pancasila-institusi formal sebagai alat determinasi politis – pola penetrasi tinggi ke masyarakat	Pancasila-institusi formal sebagai alat determinasi politis – pola penetrasi tinggi ke masyarakat	Pancasila-institusi formal sebagai alat determinasi politis – pola penetrasi moderat ke masyarakat	Pancasila-institusi formal sebagai alat determinasi politis – pola penetrasi moderat ke masyarakat
Hubungan struktural aspek ekonomi – sosial	Negatif Kausa Kumulatif	Negatif Kausa Kumulatif	Positif Kausa Kumulatif	Positif Kausa Kumulatif	Positif Kausa Kumulatif	Kontradiksi
Hubungan struktural aspek ekonomi – pergerakan politik	Negatif Kausa Kumulatif	Negatif Kausa Kumulatif	Positif Kausa Kumulatif	Positif Kausa Kumulatif	Kontradiksi	Kontradiksi
Hubungan struktural aspek ekonomi – kebebasan politik	Kontradiksi	Kontradiksi	Kontradiksi	Kontradiksi	Kontradiksi	Kontradiksi
Hubungan struktural	Kontradiksi	Kontradiksi	Positif Kausa Kumulatif	Positif Kausa Kumulatif	Kontradiksi	Positif Kausa Kumulatif

aspek sosial –
pergerakan
politik

Hubungan
struktural

aspek sosial – kebebasan politik	Positif Kausa Kumulatif	Positif Kausa Kumulatif	Kontradiksi	Kontradiksi	Kontradiksi	Positif Kausa Kumulatif
--	-------------------------------	-------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------------

Sumber: Diolah dan dianalisis berdasarkan data dari Tabel 1

Analisis bagian kedua dalam kajian ini mendeskripsikan pola dasar kedua dalam keterkaitan Pancasila dengan transformasi struktur sosial di Indonesia. Dalam *pola dasar kedua*, Tabel 2 memberikan ilustrasi tentang proses kausa kumulatif dan kontradiksi antar faktor. Di era orde lama, pada saat Pancasila sebagai basis kultural ideologis, institusi ini memberikan transformasi negatif kausa kumulatif pada hubungan struktural antara aspek ekonomi dan sosial serta antara aspek ekonomi dan pergerakan politik, serta aspek sosial dan pergerakan politik. Di sisi lain, kontradiksi terjadi pada hubungan struktural antara aspek ekonomi dan kebebasan politik dan antara aspek sosial dan pergerakan politik. Sementara, aspek sosial dan kebebasan politik menghasilkan hubungan kausa positif. Kausa kumulatif menunjukkan bahwa suatu penurunan dari aspek atau faktor tertentu mengakibatkan terjadinya penurunan atau suatu peningkatan faktor tertentu mengakibatkan kenaikan dari faktor lain. Sementara kontradiksi mendeskripsikan adanya pergerakan sebuah faktor mengakibatkan pergerakan faktor lain dengan arah yang berbeda.

Di era orde baru, institusi Pancasila diterapkan sebagai alat determinasi politik dengan penetrasi yang tinggi. Dalam fase ini, proses kausa kumulatif positif dapat terjadi antara aspek ekonomi dan sosial serta aspek ekonomi dan pergerakan politik. Di saat aspek ekonomi mengalami peningkatan, aspek sosial dan kestabilan politik dapat tercapai. Namun hal ini diikuti oleh beberapa kontradiksi yang terjadi antara hubungan struktural aspek ekonomi dan kebebasan politik, serta aspek sosial dan kebebasan politik. Kebebasan berekspresi dan hak berpolitik belum terlalu mengalami peningkatan signifikan, walaupun aspek ekonomi dan sosial mengalami peningkatan yang signifikan dari orde lama.

Pada era awal orde reformasi atau di akhir dekade 1990s, proses kontradiksi cukup dominan dalam hubungan struktural antar faktor. Kausa kumulatif positif hanya terjadi pada hubungan struktural antara aspek ekonomi dan sosial, sementara hubungan antara aspek lain menghasilkan banyak kontradiksi. Sebagai contoh, kontradiksi terjadi antara aspek ekonomi dan kebebasan politik. Kenaikan PDB per kapita di awal dekade 1990s, ternyata tidak diikuti dengan kebebasan berekspresi dan hak politik warga negara. Dekade

1990s merupakan fase terakhir dari rezim orde baru yang memanfaatkan institusi Pancasila sebagai alat determinasi politik. Proses penetrasi politik yang berlebihan mengakibatkan masyarakat mencapai titik jenuh dari hak dan pilihan politiknya.

Di awal dekade 2000s, Indonesia memasuki fase pasca reformasi dimana institusi Pancasila masih sebagai alat determinasi politik. Namun tingkat penetrasi politik dari institusi ini telah mengalami penurunan dibandingkan era orde baru dan cukup bersifat moderat. Pada era pasca reformasi beberapa kontradiksi masih terjadi pada beberapa hubungan struktural, antara lain hubungan struktural antara ekonomi dan sosial; ekonomi dan pergerakan politik; ekonomi dan kebebasan politik. Sementara kausa kumulatif positif terjadi pada hubungan struktural antara aspek sosial dan kebebasan politik serta aspek sosial dan pergerakan politik.

Analisis bagian ketiga mencoba memaparkan tentang pola dasar ketiga bagi institusi Pancasila dalam keterkaitannya dengan transformasi struktur sosial di Indonesia. Pola ketiga ini menjelaskan tentang karakter bahwa institusi Pancasila mengalami fase transformasi *interrelationship* dengan struktur sosial. Pancasila dan struktur sosial memiliki keterkaitan dan potensi untuk bersifat saling mempengaruhi. Sebagai ilustrasi, perubahan karakter institusi Pancasila dari natural dan kultural ideologis di era orde lama menjadi alat determinasi politis di era orde baru dipengaruhi kausa kumulatif negatif dan kontradiksi yang terjadi antar hubungan faktor pada struktur sosial. Hal ini direpresentasikan dengan adanya kemunduran aspek ekonomi yang diakhiri dengan pergerakan pergantian pemerintahan. Pergantian pemerintahan juga merupakan perubahan rezim dan sekaligus fase transformasi institusi.

Di sisi lain, karakter institusi Pancasila dapat mempengaruhi terjadinya transformasi struktur sosial. Dapat diambil sebagai contoh, era orde baru memanfaatkan Pancasila sebagai institusi formal yang berfungsi sebagai alat determinasi politik dengan penetrasi yang tinggi untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Di akhir era orde baru, posisi Pancasila sebagai alat determinasi ini memicu kejenuhan pilihan politik masyarakat yang direpresentasikan dengan beberapa kontradiksi yang ada di struktur sosial. Kontradiksi dalam hubungan struktural aspek ekonomi dengan kebebasan politik serta antara aspek ekonomi dengan pergerakan politik menjadi indikator realitas sebuah kejenuhan sosial. Hal ini masih ditambah dengan kontradiksi dalam hubungan struktural antara aspek sosial dengan kebebasan politik serta dengan pergerakan politik.

KESIMPULAN

Kajian dalam studi ini telah memberikan pemaparan analitis tentang posisi Pancasila sebagai institusi dan perannya sebagai penggerak transformasi struktur sosial di Indonesia dari dekade 1950s sampai dekade 2000s. Berdasarkan pembahasan beberapa analisis di atas, dapat disusun intisari dari kajian ini ke dalam tiga pokok kesimpulan.

Pertama, posisi Pancasila sebagai institusi memiliki hubungan struktural yang bersifat saling mempengaruhi dengan transformasi berbagai faktor dalam struktur sosial di Indonesia dalam jangka panjang. Perubahan karakter dari institusi Pancasila dapat menggerakkan transformasi berbagai aspek dalam struktur sosial, namun sebaliknya transformasi dari struktur sosial dapat secara tidak langsung menstimulasi perubahan karakteristik dari institusi Pancasila itu sendiri.

Kedua, pola hubungan struktural saling mempengaruhi antara institusi Pancasila dan struktur sosial menghasilkan kausa kumulatif (positif dan negatif dan beberapa kontradiksi. Pada saat kausa kumulatif positif dari struktur sosial terjadi pada suatu fase atau orde, struktur sosial tersebut belum mengalami transformasi secara total dan hal ini tidak akan mengakibatkan perubahan pada institusi. Namun ketika kausa kumulatif negatif dan kontradiksi yang dominan terjadi di suatu fase, maka hal ini akan memacu terjadinya transformasi struktur sosial yang potensial mengakibatkan perubahan karakter dari institusi.

Ketiga, pola hubungan struktural saling mempengaruhi antara institusi Pancasila dan struktur sosial bersifat non-deterministik, jangka panjang dan holistik. Hal ini dapat dipahami bahwa hubungan struktural tersebut belum dapat diinterpretasikan secara sempurna dengan proxy indikator yang ada. Hubungan struktural antara dua hal ini memiliki pola yang berbeda-beda dalam jangka waktu lama seiring dengan proses sejarah, serta mencakup hubungan antar faktor dalam struktur sosial masyarakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, Sebastian. (2008a). "K. William Kapp's Theory of Social Cost and Environmental Policy: Toward Political Ecological Economics". *Ecological Economics*, Volume 67:pp. 244-252.
- . (2008b). "Circular Cumulative Causation (CCC) a la Myrdal and Kapp-Political Institutionalism for Minimizing Social Cost". *Journal of Economic Issues*, Volume XLII, (Number 2):pp. 357-365.
- Boulding, Kenneth. (1984). *The World as A Total System*. United States: SAGE Publisher.
- FreedomHouse. (2010). *Freedom Index Comparative Data In 1973-2010*: Freedom House.
- Gordon, David. Weisskopf, Thomas. and Bowles, Samuel. (1983). "Long Swings and the Nonreproductive Cycle". *The American Economic Review*, Volume 73, (Number 2):pp. 152-157.
- Hill, Hal. (2008). "Indonesia's Changing Economic Geography". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, Volume 44 (Number 3):pp. 407-435.
- Indonesian Statistical Board. (2010). *Indeks Pembangunan Manusia Propinsi dan Nasional 1996-2010*. Jakarta: Indonesian Statistical Board (Badan Pusat Statistik Rep. Indonesia).
- Touwen, Jeroen. (2008). "The Economic History of Indonesia". In *EH Net Encyclopedia*, edited by R. Whalpes. Indonesia.
- Kaldor, Nicholas. (1957). "A Model of Economic Growth". *The Economic Journal*, Volume 67, (Number 268):pp. 591-624.
- . (1961). *Capital Accumulation and Economic Growth*. In *The Theory of Capital*, edited by F. A. Lutz, Hague, D. C. London: McMillan.
- Kapp, Karl William. (1963). *The Social Cost of Business Enterprise*. Nottingham, UK: Spokesman Book.
- . (1970). "Environmental Disruption and Social Cost: A Challenge to Economics". *Kyklos*, Volume 23 (Number 4):pp. 833-848.
- Kotz, David M. (2008). "The Financial of Economic Crisis 2008: A Systemic Crisis of Neoliberal Capitalism". *Review of Radical Political Economics*. Volume 41, (Number 3):pp. 305-317.
- Lawson, Tony. (1989). "Abstraction, Tendencies and Stylized Facts: A Realist Approach to Economic Analysis". *Cambridge Journal of Economics*, Volume 13:pp. 59-78.
- Marx, Karl. (1885). *Capital: A Critique of Political Economy*. Vol. Volume II. Moscow: Progress.
- Myrdal, Gunnar. (1944). *An American Dilemma*. New Jersey, United States: Harper and Row.
- . (1968). *Asian Drama: An Inquiry into Poverty of Nations*. 3 vols. New York: Twentieth Century Fund.
- O'Hara, Philip Anthony. (2007). "Uneven Development, Global Inequality and Ecological Sustainability: Recent, Trends and Patterns". *CLM Economia*, Volume 10 in Spanish:20 pp.
- . (2008). "A Myrdalian Holistic Perspective on Global and Regional Performance and Uneven Development". *Working Paper Global Political Economy Research Unit*.
- Polanyi, Karl. (1944). *Great Transformation*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Samudro, Bhimo Rizky. (2010). "Political Economy Uneven Regional Development and Local Election in Indonesia" In *Indonesia Regional Science Association Book Series No 9*. Jakarta: Indonesia Regional Science Association (IRSA).

- UNDP. (2010). *Human Development Report*. In *Various Year (1990-2010)*. Geneva: United Nations.
- Wie, Thee Kian. (2002). "The Soeharto Era and After: Stability, Development and Crisis 1966-2000". In *The Emergence of a National Economy in Indonesia 1800-2000*. Sydney: Allen & Unwin.
- World Bank. (2010). *World Development Indicator*. In *World Bank*: Data available online.
- Zedong, Mao. (1937). *On Contradiction, Selected Work of MaoTse-Tung*. Beijing, China: Foreign Language Press.